

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
BPR
2025**

PT. BPR Bahteramas Wakatobi

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	PT. BPR Bahteramas Wakatobi beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 184 Kel. Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor Telepon	0404-21422
Penjelasan Umum	Tata kelola adalah proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi atau sistem, dalam hal ini melibatkan berbagai aspek seperti pengambilan keputusan, penetapan aturan dan pengawasan kinerja. Seperti halnya BPR wajib menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam penerapan Tata Kelola yang baik pada BPR paling sedikit mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan kewajaran. Tata Kelola yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan semakin meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh BPR dengan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) dalam mengelola risiko yang baik, BPR diharapkan terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Setiap keputusan Bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu BPR harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang komperhensif untuk dapat meminimalisir dampak tersebut. BPR Bahteramas Wakatobi untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SOJK) nomor 21/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat, namun masih dibutuhkan waktu dan pematapan dalam persiapan struktur dan infrastruktur agar pelaksanaannya dapat lebih baik
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2 (Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Hasil penilaian self Assesment menunjukkan penerapan tata Kelola PT BPR Bahteramas Wakatobi memiliki nilai Komposit 2 (baik). Dalam Penerapan Tata Kelola PT BPR Bahteramas Wakatobi terdapat kelemahan yaitu jumlah Anggota Direksi yang tidak cukup memadai yaitu hanya memiliki 1 Direksi yakni Direktur Utama. PT BPR Bahteramas Wakatobi tidak memiliki Direksi Operasional sekaligus Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, pasal 10 ayat (2) BPR dan BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. selain itu Dewan komisaris pada semester ke 2 PT BPR Bahteramas Wakatobi hanya memiliki 1 Dewan Komisaris dikarenakan Anggota Dewan Komisaris pada semester pertama telah selesai masa jabatannya dan sampai saat ini belum memiliki pengganti untuk mengisi kekosongan tersebut. hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, pasal 45 ayat (1) yakni BPR atau BPRS wajib memiliki 2 orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan dengan jumlah Anggota Direksi, serta salah satu diantaranya

menjabat sebagai Komisaris Utama. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku salah satu pemegang saham pengendali pada PT BPR Bahteramas Wakatobi saat ini sedang mengupayakan proses penggabungan/konsolidasi.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	<p>NIK : 7471012612800000</p> <p>Nama : La Ode Muh. Saleh Akbar</p> <p>Jabatan : Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR, b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-undangan , c. menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR seseluruh tingkatan atau jenjang organisasi, d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan : 1. fungsi audit intern, 2. fungsi manajemen Risiko, 3. Fungsi Kepatuhan, 4. Penanggung Jawab APU-PPT, e.Menindaklanjuti Temuan Audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya, f. memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai antara lain dengan adanya : 1. pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional dan 2. penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain, g. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan, h. mengungkapkan kebijakan BPR bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai i. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris</p>
	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:</p> <p>Semua rekomendasi Dewan Komisaris telah ditindak lanjuti oleh Direksi, namun penyelesaian nasabah bermasalah dan penurunan NPL masih menjadi perhatian utama BPR kedepan</p>

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	NIK : 7471056606700000
	Nama : Dra. Yuni Nurmalawati, M.Si
	Jabatan : Ketua Dewan Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab : Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS 2. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR 3. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR 5. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris 6. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat 7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern; dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain,
Rekomendasi kepada Direksi:	
1. rapat pertama :	
1) Berdasarkan data kualitas Debitur penyumbang persentase NPL terbesar adalah kredit modal kerja. Hal tersebut membutuhkan perhatian manajemen untuk melakukan evaluasi terhadap proses dan analisis kredit tersebut. BPR diharapkan meningkatkan outstanding kredit konsumtif khususnya kepada PNS yang relative tidak bermasalah.	
2) BPR meningkatkan kualitas pelayanan BPR khususnya front office dan diseluruh lini yang terdapat pada BPR Bahteramas Wakatobi.	
3) Masih terdapat kredit modal kerja proyek yang belum lunas diharapkan BPR lebih selektif lagi dalam pemberian kredit yang dimaksud dan mengatur strategi agar kredit yang dimaksud bisa terselesaikan.	

- 4) Debitur yang terdampak covid berpengaruh pada lonjakan persentase kredit bermasalah (NPL) sehingga perlu dipersiapkan langkah-langkah penyelesaian terhadap debitur restrukturisasi akibat terdampak Covid.
2. Rekomendasi rapat kedua :
- 1) Perlunya BPR membuat Langkah-langkah untuk penyelesaian debitur kredit bermasalah secara konsisten dengan membuat pemetaan dan melakukan evaluasi rutin mingguan terkait pelaksanaannya.
 - 2) Meningkatkan portofolio Bisnis BPR khususnya sektor kredit konsumtif dengan lebih gencar melakukan sosialisasi produk baik secara formal ataupun informal
 - 3) Membuka peluang-peluang diversifikasi produk dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial lingkungan market BPR. 4. BPR senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada debitur, dengan mengedepankan kultur lokal BPR; Dengan adanya kredit sindikasi yakni kerjasama dengan BPR lain bisa meningkatkan performa BPR ke depan.
3. Rekomendasi rapat ketiga :
- 1) BPR diharapkan fokus untuk melakukan penagihan serta penyelesaian kredit bermasalah dan rutin melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan kredit NPL sehingga dapat lebih efektif dalam pelaksanaannya.
 - 2) Meningkatkan portofolio Bisnis BPR khususnya sektor kredit konsumtif dengan lebih gencar melakukan sosialisasi produk baik secara formal ataupun informal.
 - 3) Senantiasa menjalin komunikasi dengan Pemerintah Daerah dan mengupayakan Kerjasama pengelolaan dana yang memungkinkan bagi BPR.
 - 4) BPR senantiasa meningkatkan kemampuan sumber daya manusia disegala lini sehingga mampu beradaptasi pada kondisi keuangan digital yang begitu cepat saat ini.
4. Rapat Ke Empat Membahas tentang rancangan RBB, Pencapaian target RBB dan pelaksanaan APU-PPT

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Program Kerja :
	Realisasi :
	Jumlah Rapat :
2.	Komite Pemantau Risiko

2.									
3.									

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	7471012612800000	La Ode Muh. Saleh Akbar	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.	7471056606700000	Dra. Yuni Nurmalawati, M.Si	-	-	-
2.	7471022801620000	DR. H. Nasrullah Dali, SE,M.Si, AK, CA	-	-	-

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.		PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PERUSAHAAN AIR MINUM DAERAH	100,00	100,00
2.		PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PD. PERCETAKAN SULTRA	100,00	100,00
3.		PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PD. UTAMA SULTRA	100,00	100,00

4.		PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PT. BANK SULTRA	32,87	36,63
5.		PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PT.BPR BAHTERAMAS WAKATOBI	46,74	49,78
6.		PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PT.BPR BAHTERAMAS KENDARI	81,89	81,89
7.		PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PT.BPR BAHTERAMAS KOLAKA	32,62	32,62
8.		PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PT.BPR BAHTERAMAS KONAWE	51,60	51,60
9.		PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PT.BPR BAHTERAMAS KONSEL	63,00	63,00
10.		PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PT.BPR BAHTERAMAS BOMBANA	82,17	82,17
11.		PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PT.BPR BAHTERAMAS BAU-BAU	90,04	85,65
12.		PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PT.BPR BAHTERAMAS BUTON	74,03	60,06
13.		PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PT.BPR BAHTERAMAS RAHA	58,60	58,60
14.		PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PT.BPR BAHTERAMAS KONAWE UTARA	73,28	69,28
15.		PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PT.BPR BAHTERAMAS KOLAKA UTARA	64,44	64,44
16.		PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PT.BPR BAHTERAMAS KONAWE UTARA	42,32	42,32
17.		PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI	PT.BPR BAHTERAMAS WAKATOBI	37,08	37,08
18.		DESA SE -KABUPATEN WAKATOBI	PT.BPR BAHTERAMAS WAKATOBI	16,18	16,18

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
	7471012612800000	La Ode Muh. Saleh Akbar		-	-
				-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
	7471056606700000	Dra. Yuni Nurmalawati, M.Si		-	-
	7471022801620000	DR. H. Nasrullah Dali, SE,M.Si, AK, CA		-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	7471012612800000	La Ode Muh. Saleh Akbar	Tidak ada hubungan keuangan dengan Direksi lain	Tidak ada hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham
			Tidak ada hubungan keuangan dengan Direksi lain	Tidak ada hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham
			Tidak ada hubungan keuangan dengan Direksi lain	Tidak ada hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	7471056606700000	Dra. Yuni Nurmalawati, M.Si	Tidak ada hubungan keuangan dengan Direksi	Tidak ada hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris lain	Tidak ada hubungan keuangan dengan Pemegang Saham

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.		PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Tidak ada hubungan keuangan dengan Direksi	Tidak ada hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris	Tidak ada hubungan keuangan dengan Direksi
2.		PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI	Tidak ada hubungan keuangan dengan Direksi	Tidak ada hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris	Tidak ada hubungan keuangan dengan Direksi
3.		DESA SE KABUPATEN WAKATOBI	Tidak ada hubungan keuangan dengan Direksi	Tidak ada hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris	Tidak ada hubungan keuangan dengan Direksi

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	7471012612800000	La Ode Muh. Saleh Akbar	Tidak ada hubungan Keluarga	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

			dengan Direksi lain	Keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris	Keluarga dengan Pemegang Saham

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	7471056606700000	Dra. Yuni Nurmalawati, M.Si	Tidak ada hubungan Keluarga dengan Direksi	Tidak ada hubungan Keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lain	Tidak ada hubungan Keluarga dengan Pemegang Saham
2.	7471022801620000	DR. H. Nasrullah Dali, SE,M.Si, AK, CA	Tidak ada hubungan Keluarga dengan Direksi	Tidak ada hubungan Keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lain	Tidak ada hubungan Keluarga dengan Pemegang Saham

3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.		PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Tidak ada hubungan Keluarga dengan Direksi	Tidak ada hubungan Keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris	Tidak ada hubungan Keluarga dengan Pemegang Saham lain
2.		PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI	Tidak ada hubungan Keluarga dengan Direksi	Tidak ada hubungan Keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris	Tidak ada hubungan Keluarga dengan Pemegang Saham lain
3.		DESA SE KABUPATEN WAKATOBI	Tidak ada hubungan Keluarga dengan Direksi	Tidak ada hubungan Keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris	Tidak ada hubungan Keluarga dengan Pemegang Saham lain

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	1	92.259.000	1	104.633.100
2.	Tunjangan	1	169.323.750	-	-
3.	Tantiem	1	2.950.809	1	1.180.324
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunersi lainnya	1	21.798.563	1	8.719.425
	Total Remunerasi		301.063.145		114.532.849
	Jenis Fasilitas Lain				
1.	Perumahan	1	18.000.000		-
2.	Transportasi				-
3.	Asuransi Kesehatan	1	7.200.000		-
4.	Fasilitas Lainnya	1	20.119.827		-
	Total Fasilitas Lainnya		45.319.827		-
	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		331.651.949		114.532.849

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	a/b
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1.86
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.00

Peyelesaian								
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Total	-	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN



No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN


No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	25/03/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Festival Kajiri Thn 2025 Oleh Karangtaruna Posaa'sa Desa Waginopo	Panitia Penyelenggara acara	1.000.000

2.	25/03/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Proposal Ramadhan Masindeka 4.0 Oleh Winulu	Panitia Penyelenggara acara	700.000
3.	30/04/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Kontribusi Pameran Halo SULTRA tahun 2025 Di Kab Kolaka	Panitia Penyelenggara acara	16.000.000
4.	03/09/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Kontribusi By Rakornas Tahun 2025	Panitia Penyelenggara acara	296.325
5.	23/10/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Kontribusi Biaya Kegiatan STQH Tingkat Nasional XXVIII Tahun 2025	Panitia Penyelenggara acara	5.054.667
6.	18/11/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Proposal Waterpark Wakatobi Spesial Event	Panitia Penyelenggara acara	1.000.000
7.	27/11/2025	01 (Kegiatan Sosial)	Sumbangan Proposal Festival Anak Bergerak Ceria Tingkat Kab Wakatobi Tahun 2025	Panitia Penyelenggara acara	1.000.000

Wangi-Wangi, 21 April 2025
PT BPR Bahteramas Wakatobi

La Ode Muh. Saleh Akbar
Direktur Utama



Dra. Yuni Nurmalawati, M.Si
Komisaris Utama